

**PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
(STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA
TAHUN 2016)**



PENULISAN HUKUM

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan Untuk

**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat S1
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

Febrian Indar S. K.

E0013179

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016)**

Oleh:

FEBRIAN INDAR S.K

NIM. E0013179

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulis Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing


Surakarta, 17 Juli 2017

Pembimbing I



Dr. ISHARYANTO, S.H., M.Hum
NIP. 197805012003121002

Pembimbing II



JADMIKO ANOM HUSODO, S.H., M.H
NIP. 197004241995121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
(STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SURAKARTA TAHUN 2016)**

Oleh

Febrian Indar S. K.

NIM. E 0013179

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 31 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Suranto S.H., M.H.
NIP : 195608121986011001
Ketua

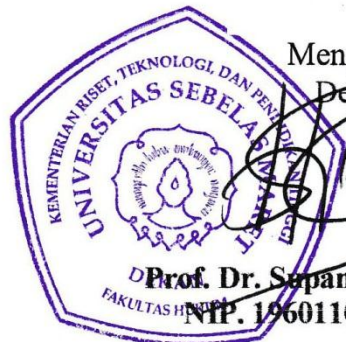
(.....)

2. Nama : Dr. Isharyanto S.H., M.Hum.
NIP : 197805012003121002
Sekretaris

(.....)

3. Nama : Jadmiko S.H., M.H.
NIP : 197004241995121001
Anggota

(.....)



Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Febrian Indar S. K.
NIM : E 0013179

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **PENGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 26 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Febrian Indar S. K.

NIM. E 0013179

ABSTRAK

FEBRIAN INDAR SURYA KUSUMA. E0013179. 2013. PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Surakarta Tahun 2016 untuk pembentukan peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul terkait dengan penggunaan hak inisiatif DPRD Tahun 2016 dalam pembentukan Peraturan Daerah dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di DPRD daerah Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tahun 2016 yang terlibat langsung dalam penggunaan hak inisiatif serta kepala rapat dan perundang-undangan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Surakarta tahun 2016 dalam pembentukan peraturan daerah sudah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum optimal karena dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya satu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari DPRD Kota Surakarta tahun 2016. Dalam pembentukan peraturan daerah hasil inisiatif DPRD Kota Surakarta masih dijumpai beberapa hambatan akan tetapi pada prinsipnya semua hambatan tersebut telah dapat teratasi.

Kata Kunci: Hak Inisiatif, Peraturan Daerah, DPRD

ABSTRACT

FEBRIAN INDAR SURYA KUSUMA. E0013179. USE OF INITIATIVE RIGHTS FOR ESTABLISHMENT OF LOCAL REGULATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF REGIONAL AUTONOMY (STUDY AT THE COUNCIL OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE OF SURAKARTA IN 2016)

The aim of the research is to know and analyze the use of initiative right of Regional People's Representative Assembly (DPRD) in Surakarta on 2016 for forming the regional regulation within framework of regional autonomy and to know the problems are arising that related the use of People's Representative Assembly's initiative right on 2016 for the forming of Local Regulation and its solutions.

This research is descriptive empirical law research. The location of it in DPRD Surakarta. The type of data are used by primary and secondary data. Primary data is the main data that obtained from DPRD members 2016 interview whom are directly involves within the use of right initiative and head of meeting and legislation in secretariat of DPRD in Surakarta. Secondary data are about data which support the primary data both of internet and bibliography. Data collection techniques are used by interview and bibliography. Analysis of quantitative data with interactive data model.

Based on the result of research and discussion concluded that the use of DPRD right initiative in Surakarta 2016 for the forming of regional regulation is appropriate based on the prevailing regulations but they aren't optimal yet because by the local regulation which has been discussed only one local regulation which is the result of the DPRD right initiative 2016. The formation of local regulation resulted the initiative of DPRD is still found some obstacles but the principle is all of them has been resolved.

Keyword: Initiative Right, Regional Regulation, DPRD

MOTTO

“Hawya Pegat ngudiya Ronging budiyayu

Margane suka basuki

Dimen luwar kang kinayaun

Kalising panggawe sisip

Ingkang taberi prihatos”

Jangan berhenti selalulah berusaha berbuat kebajikan,

Agar mendapat kegembiraan serta keselamatan,

Serta tercapai segala cita-cita,

Terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan,

Caranya haruslah gemar Prihatin

(Raden Ngabehi Ronggowarsito)

“Manusia yang belum pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan”

(Kahlil Gibran)

Persembahan

Teiring rasa syukur kepada Allah SWT,

Penulisan Hukum (skripsi) ini

Kupersembahkan untuk:

1. Orang Tuaku, yang selalu menyayangiku dan mencintaiku;
2. Kakak-kakakku, yang selalu memberi semangat;
3. Sahabat dan teman-temanku
4. Para pembaca sekalian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: **“PENGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SURAKARTA TAHUN 2016)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kehidupan dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Kedua orang tua tercinta (Bapak Didit Rudi Endar W, S.Pd serta Ibu Tri Pudyastuti), yang telah memberikan segala-galanya baik formil maupun materiil dalam kehidupan penulis, tiada kata yang tepat dapat mewakili rasa terima kasih Ananda.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I Skripsi yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang di tengah kesibukan beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan arahan dan semangat bagi tersusunnya skripsi ini.

6. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu sabar dalam memberi bimbingan, motivasi, dan semangat untuk penulis.
7. Bapak Suranto S.H.,M.H. Selaku Kepala bagian Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan, petunjuk dan semangat bagi penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus segala administrasi skripsi dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang selama ini telah memberikan pelayanan dan menjalin hubungan yang baik dengan penulis.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulis penelitian ini.
12. Ibu Sri Kadarwati, S.H., M.M. (Kepala Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan) yang telah berkenan membantu memberikan informasi terkait dengan penulisan penelitian ini.
13. Bapak H. Abdul Ghofar Ismail S.Si. (Wakil Ketua 1 DPRD Kota Surakarta) yang telah berkenan membantu meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan penulisan penelitian ini.
14. Bapak Putut Gunawan (Ketua Bapemperda DPRD Surakarta) yang telah berkenan membantu meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan penulisan penelitian ini.
15. Bapak Taufiqurrahman (Wakil Ketua Bapemperda DPRD Surakarta) yang telah berkenan membantu meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan penulisan penelitian ini.

16. Saudara Kandung penulis Desi Indar Kusumastuti S.Pd, Satria Indar Dwi Kusuma, Septian Danang ITK., S.H. yang memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan arti sentuhan jiwa dalam hidup penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat baik suka maupun duka yang tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak dapat dapat penulis sebutkan satu per satu.
18. Keluarga besar Kantor Notaris dan PPAT Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. yang telah meberikan banyak ilmu dan pengalaman magang bagi penulis.
19. Keluarga Besar KKN Belitung Timur yang telah memberikan semangat dan kekeluargaannya
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekuarangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga sebuah karya kecil ini mapu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surakarta, 26 Juli 2017

Penulis

Febrian Indar S. K.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	
a. Pemerintah Daerah	11
b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	12
c. Ciri-Ciri Pemerintahan Daerah	13
2. Tinjauan tentang Otonomi Daerah	
a. Otonomi Daerah	14

b. Hakikat Otonomi Daerah	15
c. Tujuan Otonomi Daerah.....	16
3. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	17
b. Fungsi DPRD	17
c. Kewajiban DPRD.....	17
4. Tinjauan umum tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).....	18
5. Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah	
a. Profil DPRD Kota Surakarta	
1) Alat Kelengkapan DPRD Surakarta 2014-2019	27
2) Sekretariat DPRD Kota Surakarta.....	48
b. Dasar Hukum Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kota Surakarta Tahun 2016	
1) Kewenangan DPRD Menggunakan Hak Inisiatif	53
2) Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Kota Surakarta	57
c. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016	69
2. Permasalahan yang Menghambat Penggunaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Surakarta Tahun 2016.....	72

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah	74
2. Permasalahan yang Menghambat Penggunaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Surakarta 2016 serta cara mengatasinya	
a. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penggunaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah	84
b. Solusi Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penggunaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah	85
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1. Tabel 1. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi I DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya	30
2. Tabel 2. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komis II DPRD Surakarta dan Parta Politik Asalnya	32
3. Tabel 3. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi III DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya	33
4. Tabel 4. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotan Komisi IV DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya	35
5. Tabel 5. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya.....	38
6. Tabel 6. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya.....	41
7. Tabel 7. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya.....	44
8. Tabel 8. : Daftar Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Surakarta dan Partai Politik Asalnya.....	48
9. Tabel 9. : Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta 2016	70

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	24
2. Gambar 2. Struktur Organisasi DPRD Kota Surakarta.....	28
3. Gambar 3. Prosedur Peraturan Daerah Usulan DPRD Berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015	68